

**ANALISIS BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
TAHUN ANGGARAN 2010 – 2016**

Oleh:

**SITI AISAH**([Naisyaputry.hannysa99@gmail.com](mailto:Naisyaputry.hannysa99@gmail.com))

**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman Samarinda**

**Dwi Risma Deviyanti**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman*

**Hj. Anisa Kusumawardani**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman*

**ABSTRACT**

*Siti Aisah. 2018. Analysis of Regional Expenditure on the government of Samarinda City. Under the guidance of Dwi Risma Deviyanti and Hj. Anisa Kusumawardani.*

*This study aims to evaluate whether samarinda city government has used APBD economically, efficiently, and effectively (value for money). Period 2010 - 2016 seen from shopping variance, Shopping growth, keserasian Shopping, efficiency of expenditure and expenditure area to PDRB.*

*The results showed that the performance of the Samarinda city government budget is generally good. This can be seen from (a) Shopping Variance with average of 78,62%, (b) Shopping Growth with average 17,82%, (c) Spending Per function realized 100%, Expense Operation with average 66 , 22%, Capital Expenditure with an average of 33.73%, Direct Spending with 61.47% average and Indirect Shopping with 38.53% Average, Regional Expenditure Efficiency shows below 100% average which is 78, 62%, and Expenditure on GRDP with an average of 197,061%.*

*Keywords: Regional Expenditure, Local Expenditure Analysis, Budget Expenditure and Budget Realization Report.*

## ABSTRAK

**Siti Aisah.** 2018. Analisis Belanja Daerah pada pemerintah Kota Samarinda. Dibawah bimbingan **Dwi Risma Deviyanti** dan **Hj. Anisa Kusumawardani.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pemerintah kota samarinda telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Periode 2010 – 2016 dilihat dari varians belanja, pertumbuhan Belanja, keserasian Belanja, efisiensi belanja dan belanja daerah terhadap PDRB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran pemerintah Kota Samarinda secara umum dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari (a) Varians Belanja dengan rata – rata 78,62 %, (b) Pertumbuhan Belanja dengan rata – rata 17,82%, (c) Belanja Per fungsi terealisasi 100%, Belanja Operasi dengan rata - rata 66,22%, Belanja Modal dengan rata - rata 33,73%, Belanja Langsung dengan rata – rata 61,47% dan Belanja Tidak langsung dengan rata rata 38,53%, Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata – rata dibawah 100% yaitu 78,62%, dan Belanja Terhadap PDRB dengan rata rata 197,061%.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Analisis Belanja Daerah, Anggaran Belanja dan Laporan Realisasi Anggaran.

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Mahmudi (2010:142) Analisis Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah Kota Samarinda daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien dan efektif. Analisis Varians Belanja memberikan informasi perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis Pertumbuhan Belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis keserasian belanja akan memberikan informasi tentang keseimbangan antar belanja. Rasio Efisiensi Belanja memberikan informasi perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja sedangkan Rasio Belanja

Daerah terhadap PDRB akan menunjukkan produktivitas dan efisiensi belanja daerah.

Berikut ini disajikan mengenai Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Samarinda tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

**Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Samarinda**

Tahun	Anggaran Belanja			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang)	Persentase (%)
2010	2.141.435.090.952,00	1.508.287.504.807,38	633.147.586.144,62	70,43 %
2011	1.856.325.806.268,00	1.475.901.584.953,97	380.424.221.314,03	79,51 %
2012	2.677.737.799.272,00	2.005.650.172.493,47	672.087.626.778,53	74,90 %
2013	3.841.356.806.287,00	2.869.579.631.651,84	971.777.174.635,16	74,70 %
2014	3.890.928.664.090,00	3.201.662.936.936,86	689.265.727.153,14	82,29 %
2015	4.063.842.554.801,48	3.237.540.741.278,13	826.301.813.523,35	79,67 %
2016	2.624.916.838.977,28	2.331.928.898.582,64	292.987.940.394,64	88,84 %

(Sumber : LRA BPKAD Kota Samarinda)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja pada Pemerintah Kota Samarinda. Pada tahun 2010 anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebesar Rp 2.141.435.090.952,00 dengan terealisasi sebesar Rp 1.508.287.504.807,38 terdapat selisih kurang sebesar Rp. 633.147.586.144,62 dengan persentase sebesar 70,43%.

Pada tahun 2011 anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebesar Rp1.856.325.806.268,00 dengan terealisasi sebesar Rp1.475.901.584.953,97 terdapat selisih kurang sebesar Rp 380.424.221.314,03 dengan persentase 79,51%. Kemudian pada tahun 2012 anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebesar Rp 2.677.737.799.272,00 dengan terealisasi belanja sebesar Rp 2.005.650.172.493,47 terdapat selisih kurang sebesar Rp 672.087.626.778,53 dengan persentase 74,90%.

Pada tahun 2013 anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp 3.841.356.806.287,00 dengan terealisasi sebesar Rp 2.869.579.631,651.84 terdapat selisih kurang sebesar Rp 971.777.174.635,16 dengan persentase 74,70%. Pada tahun 2014 anggaran belanja sebesar Rp 3.890.928.664.090,00 dengan terealisasi sebesar Rp3.201.662.936.936.86 terdapat selisih kurang sebesar Rp 689.265.727.153,14 dengan persentase 82,29%. Pada tahun 2015 anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp4.063.842.554.80,48 dengan realisasi belanja sebesar Rp 3.237.540.741.278,13 dan terdapat selisih kurang sebesar Rp 826.301.813.523,35 dengan persentase 79,67%.

Kemudian Pada tahun 2016 anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp 2.624.916.838.977,28 dengan realisasi belanja sebesar Rp 2.331.928.898.582,64 terdapat selisih sebesar Rp 292.987.940.394,64 dengan persentase 88,84%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda yang ditetapkan tidak terealisasi secara menyeluruh karena realisasi yang dicapai lebih kecil dari yang dianggarkan. Dari data anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda dapat dilihat apakah anggaran dan realisasi belanja menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kinerja yang telah dicapai.

Analisis Belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi Pemerintah Kota Samarinda telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien

dan efektif. Maka mengambil judul “Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2010 – 2016”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terjadinya Varians Belanja, terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan Belanja, perkembangan belanja dari tahun ke tahun?
3. Bagaimana Keserasian Belanja atau keseimbangan antar belanja dalam fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda?
4. Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan anggaran pemerintah Kota Samarinda dalam merealisasikan Belanja Daerah?
5. Bagaimana produktivitas dan efektivitas belanja daerah dengan perbandingan antara total belanja daerah terhadap PDRB yang dihasilkan pada Pemerintah Kota Samarinda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pemerintah kota samarinda telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*), maka dilakukan analisis anggaran pada belanja daerah antara lain berupa:

1. untuk mengetahui terjadinya Varians Belanja, terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Belanja, perkembangan belanja dari tahun ke tahun.
3. Untuk mengetahui Keserasian Belanja atau keseimbangan antar belanja dalam fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda.
4. Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran pemerintah Kota Samarinda dalam merealisasikan Belanja Daerah.
5. Untuk mengetahui produktivitas dan efektivitas belanja daerah dengan perbandingan antara total belanja daerah terhadap PDRB yang dihasilkan pada Pemerintah Kota Samarinda.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademis secara kritis yang berhubungan dengan keuangan daerah khususnya mengenai belanja daerah di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, Manfaat Penelitian bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi khusus mengenai kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam dalam pengelolaan realisasi anggaran belanja daerah.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Dari sudut ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

### **2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut seharusnya disajikan. Standar akuntansi pemerintah mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana melaporkannya. Apa saja yang harus dilaporkan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi lainnya diatur dalam standar akuntansi tersebut. (Penjelasan UU No.23 Tahun 2014)

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.3.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Mahmudi (2010:15) Pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Siklus Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

#### **2.3.2 Kinerja Anggaran**

Menurut Abdul dan Syam (2012:126) Kinerja anggaran merupakan sebuah prestasi kinerja pada suatu penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dengan pelaksanaan anggaran. Penilaian kinerja berupa evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan, Kinerja anggaran dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran. Satuan kerja perangkat daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan. Sebagai perwujudan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah menggunakan anggaran belanja wajib dilaporkan kedalam laporan realisasi anggaran.

#### **2.3.3 Belanja Daerah**

Mahmudi (2010:156). Belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan sama-sama membutuhkan bukti pengeluaran kas. Perbedaannya adalah untuk pengeluaran pembiayaan membutuhkan bukti pendukung berupa bukti memorial dan perlu persetujuan DPRB.

## **2.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Ariefiansyah & Utami (2012:3). Laporan Keuangan adalah catatan keuangan mengenai aktivitas perusahaan atau organisasi selama kurun waktu tertentu (satu periode akuntansi/satu tahun) yang memperlihatkan kondisi pada kurun waktu dan dipergunakan sebagai informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

## **2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan seluruh nilai tambah pada produk barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan atas dasar faktor produksi. Hal ini yang memberi gambaran totalitas nilai tambah yang tercipta barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha disuatu daerah dalam satu tahun.

## **2.7 Analisis Belanja Daerah**

Mahmudi (2010:156). Analisis belanja daerah merupakan hal penting yang dilakukan untuk mengevaluasi sudahkah pemerintah daerah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Dan Sejauh mana pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah di nilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang di anggarkan, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi

# **III. METODE PENELITIAN**

## **3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi operasional merupakan salah satu instrumen dari riset yang memberikan informasi mengenai operasional dari variabel – variabel yang akan diteliti, antara lain :

### **a. Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah yang digunakan dalam membiayai semua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **b. Analisis Belanja Daerah**

Analisis Belanja Daerah merupakan alat untuk menganalisis kinerja pemerintah kota samarinda dalam mengelola keuangan belanja daerahnya. Belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda berupa belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja daerah dalam penelitian ini merupakan dari data Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRA) Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2010 – 2016.

### **c. Anggaran Belanja**

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda merupakan rencana keuangan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang berisi daftar sistematis bab terperinci yang memuat rencana pengeluaran selama satu tahun anggaran yang digunakan sebagai pedoman.

d. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam satu periode.

### 3.2 Data Yang Diperlukan

Untuk mempermudah penelitian yang diperlukan maka data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Kota Samarinda dan BPKAD (Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2010 sampai tahun 2016

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka sebagai alat menganalisis. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang berkaitan dengan kinerja anggaran Pemerintah Kota Samarinda tahun 2010 sampai 2016 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.

### 3.3 Alat Analisis

Dalam penelitian ini penulis menganalisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan rumusan masalah dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mahmudi (2010:156-166). Adapun tahap – tahapan alat analisis sebagai berikut:

#### 3.3.1 Analisis Varians Belanja

Mahmudi (2010:157) Analisis Varians merupakan perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:157)

#### 3.3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Mahmudi (2010:160) Analisis Pertumbuhan Belanja mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode berikutnya. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja THn } t-1}{\text{Realisasi Belanja } t-1}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:160)

#### 3.3.3 Analisis Keserasian Belanja

Mahmudi (2010:162) Keserasian Belanja adalah keseimbangan antar belanja. Keserasian belanja bagi pemerintah daerah bermanfaat dalam

mengalokasikan keseluruhan belanja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja anggaran. Analisis keserasian belanja dapat berupa :

#### 3.3.3.1 Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja

Analisis Belanja per Fungsi sangat penting untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah. Rasio Belanja per Fungsi Terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi...}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:162)

#### 3.3.3.2 Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Mahmudi (2010:164) Analisis Belanja Operasi Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:164)

#### 3.3.3.3 Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Mahmudi (2010:164) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio Belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:164)

#### 3.3.3.4 Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Mahmudi (2010:165) Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian pengendalian anggaran. Rasio Belanja Langsung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:165)

Sedangkan rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:166)

### 3.3.4 Rasio Efisiensi Belanja

Mahmudi (2010:166) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:166)

### 3.3.5 Rasio Belanja terhadap PDRB

Mahmudi (2010:166). Rasio Belanja terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio Belanja terhadap PDRB dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

(Sumber : Mahmudi, 2010:166)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Kota Samarinda

Kota Samarinda yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak Anggana dan Kecamatan Sanga – sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

### 4.2 Hasil Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 – 2016 Pemerintah Kota Samarinda

Analisis belanja dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (Value For Money). Untuk Mencapai tujuan penelitian maka, dilakukan analisis belanja daerah yaitu mengetahui varians belanja, tingkat pertumbuhan belanja, tingkat keserasian belanja, tingkat efisiensi belanja dan tingkat belanja terhadap PDRB pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda.

#### 4.2.1 Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja Tahun 2010 sebesar 70,43%, Pada Tahun 2011 sebesar 79,51%, dan Pada Tahun 2012 sebesar 74,90%, Pada Tahun 2013 sebesar 74,70%, Pada Tahun 2014 sebesar 82,29%, kemudian Pada Tahun 2015 sebesar 79,67%. Varians Belanja Pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun

2016 menunjukkan adanya selisih kurang (bersaldo negatif) yang menunjukkan adanya efisiensi dan penghematan anggaran Pada Pemerintah Kota Samarinda.

#### **4.2.2. Analisis Pertumbuhan Belanja**

Pertumbuhan belanja tahun 2010 sebesar 2,92%. Pada tahun 2011 sebesar 2,15%. Kemudian Pada tahun 2012 sebesar 35,89%. Pada tahun 2013 sebesar 43,07%. Pada tahun 2014 sebesar 11,57%. Pada tahun 2015 sebesar 1,15%. Dan Pada tahun 2016 sebesar 27,99%. Nilai rata – rata rasio pertumbuhan belanja sebesar 17,82%. Pertumbuhan Belanja dari tahun 2010 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan dan penurunan

#### **4.2.3 Analisis Keserasian Belanja**

##### **4.2.3.1 Analisis Belanja Per Fungsi**

Rasio Belanja Per Fungsi tahun 2010 sampai tahun 2016 belanja daerah terealisasi 100%. Melaksanakan ketentuan perundangan seperti ketentuan Undang – Undang Dasar yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari total APBD, serta kecukupan tentang porsi anggaran kesehatan, lingkungan hidup dan perlindungan sosial. Sesuai dengan Belanja per fungsi Pendidikan Tahun 2010 sebesar 31,64%, Tahun 2011 sebesar 42,69%, Tahun 2012 sebesar 27,37%, Tahun 2013 sebesar 23,85%, Tahun 2014 sebesar 23,10%, Tahun 2015 sebesar 22,84%, dan Tahun 2016 sebesar 31,75%.

##### **4.2.3.2 Analisis Belanja Operasi**

Rasio belanja operasi mengenai porsi belanja pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2010 sebesar 71,28% dari total anggaran yang terpakai, pada tahun 2011 belanja operasi yang dipakai sebesar 80,88%. Pada tahun 2012 belanja operasi yang dipakai sebesar 64,64%. Pada tahun 2013 belanja operasi yang dipakai sebesar 55,38%. Pada tahun 2014 belanja operasi yang dipakai sebesar 58,69%. Pada tahun 2015 belanja operasi yang dipakai sebesar 62,59%. Pada tahun 2016 belanja operasi yang dipakai sebesar 70,12%. Nilai rata – rata rasio belanja operasi sebesar 66,22% dikatakan serasi karena kurang dari 100% maka penghematan anggaran berjalan dengan baik.

##### **4.2.3.3 Analisis Belanja Modal**

Belanja Modal tahun 2010 yang digunakan sebesar 28,67% dari total belanja anggaran. Pada tahun 2011 yang digunakan sebesar 19,05% dari total belanja yang dianggarkan. Pada tahun 2012 yang digunakan sebesar 35,30%. Pada tahun 2013 yang digunakan sebesar 44,62%. Pada tahun 2014 yang digunakan sebesar 41,31%. Pada tahun 2015 yang digunakan sebesar 37,35%. Pada tahun 2016 yang digunakan sebesar 29,84% dari total belanja yang dianggarkan. Nilai rata – rata rasio belanja modal sebesar 33,73% dikatakan kurang serasi karena kurang dari 60%.

##### **4.2.3.4. Analisis Belanja Langsung dan Tidak langsung**

Rasio proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada perhitungan rasio belanja langsung tahun 2010 sebesar Rp 897.309.018.252,45 dan belanja tak langsung sebesar Rp610.978.486.554,93 dengan total belanja sebesar Rp 1.508.287.504.807,38. Persentase total belanja

langsung yang digunakan sebesar 59,49% dan belanja tak langsung sebesar 40,51%.

Sedangkan Pada tahun 2011 Belanja Langsung sebesar Rp 798.290.573.714,64 dan belanja tak langsung sebesar Rp 677.611.011.239,33 dengan total belanja sebesar Rp 1.475.901.584.953,97. Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 54,09% dan belanja tak langsung sebesar 45,91%.

Pada tahun 2012 Belanja Langsung sebesar Rp 1.204.618.112.394,51 dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp 801.032.060.098,96 dengan total belanja sebesar Rp 2.005.650.172.493,47. Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 60,06% dan belanja Tak Langsung sebesar 39,94%. Dan

Pada tahun 2013 Belanja Langsung sebesar Rp 1.888.014.103.601,21 dan belanja tak langsung sebesar Rp 981.565.528.050,63. dengan total belanja sebesar Rp 2.869.579.631.651,84. Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 65,79% dan belanja tak langsung sebesar 34,21%.

Kemudian pada tahun 2014 Belanja Langsung sebesar Rp 2.066.165.723.657,34 dan belanja tak langsung sebesar Rp 1.135.497.213.279,52 dengan total belanja sebesar Rp 3.201.662.936.936,86. Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 64,53% dan belanja tak langsung sebesar 35,47%.

Pada tahun 2015 Belanja Langsung sebesar Rp 2.023.422.726.173,95 dan belanja tak langsung sebesar Rp 1.215.138.394.919,18 dengan total belanja sebesar Rp 3.238.561.121.093,13. Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 62,48% dan belanja tak langsung sebesar 37,52%.

Pada tahun 2016 Belanja Langsung sebesar Rp 1.489.408.194.672,07 dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp 842.520.703.910,57 dengan total belanja sebesar Rp 2.331.928.898.582,64. Persentase total belanja langsung yang digunakan sebesar 63,87% dan belanja tak langsung sebesar 36,13%.

#### **4.2.4 Rasio Efisiensi Belanja**

Pada tabel 4.27 dijelaskan bahwa rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan pemerintahan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan nilai efisiensi pada tahun 2010 sebesar 70,43 %, nilai efisiensi pada tahun 2011 sebesar 79,51 %, nilai efisiensi pada tahun 2012 sebesar 74,70 %, nilai efisiensi pada tahun 2013 sebesar 74,70 %, nilai efisiensi pada tahun 2014 sebesar 82,29 %, nilai efisiensi pada tahun 2015 sebesar 79,67 % dan nilai efisiensi pada tahun 2016 sebesar 88,84 %. Jika dilihat sejak tahun 2010 sampai tahun 2016 nilai efisiensi kurang dari 100% maka penghematan anggaran berjalan dengan baik atau efisien.

#### **4.2.5 Rasio Belanja terhadap PDRB**

Pada tabel 4.28 dijelaskan bahwa Rasio Belanja <sup>PDRB</sup> Tahun 2010 sebesar 203,616%, Tahun 2011 sebesar 282,192%, Tahun 2012 sebesar 205,633%, Tahun 2013 sebesar 156,205%, Tahun 2014 sebesar 150,777%, Tahun 2015 sebesar 156,867%. Tahun 2016 sebesar 224,134%. Rasio PDRB cenderung tidak stabil yang mengakibatkan rendahnya pendapatan belanja suatu daerah. Ketidakstabilan PDRB mengakibatkan penurunan pada belanja daerah.

### **4.3 Pembahasan Hasil Analisis Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2010 – 2016 Pemerintah Kota Samarinda**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap laporan realisasi

anggaran Pemerintah Kota Samarinda tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

#### **4.3.1 Analisis Varians (Selisih) Belanja**

Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2010 sampai 2016 mengalami selisih kurang. Faktor dari penyebab selisih kurang adalah rendahnya Belanja Modal sebagai akibat dari rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan dan Irigasi serta Aset Tetap Hal ini menunjukkan bahwa adanya selisih kurang (bersaldo negarif) realisasi belanja yang tidak melebihi anggaran, dengan kata lain selisih yang menguntungkan (*favourable variance*).

#### **4.3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja**

Tingkat pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2016 mengalami peningkatan dan penurunan dalam persentasinya. Pertumbuhan Belanja 2010 sebesar 2,92% bersaldo negatif, Pertumbuhan 2011 sebesar 2,15% bersaldo negatif. Pertumbuhan 2012 sebesar 35,89% positif, Pertumbuhan 2013 meningkat sebesar 43,07% positif, Pertumbuhan 2014 menurun sebesar 11,57% namun tetap baik karena bersaldo positif, Pertumbuhan 2015 kembali menurun sebesar 1,15% positif. Dan Pertumbuhan 2016 menurun sebesar 27,99% bersaldo negatif. Persentasi setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan, dikatakan bahwa pertumbuhan belanja tidak stabil. Pada tahun 2013 peningkatan paling besar sebesar 43,07%, rasio tersebut berada pada pertumbuhan yang sangat baik dibandingkan tahun 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 dan tahun 2016. Pertumbuhan belanja tahun 2010 sampai dengan 2016 meningkat terkecuali di tahun 2010, 2011 dan 2016.

Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Samarinda tidak merealisasikan belanja Modal dengan baik dan mengurangi porsi belanja yang dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah seperti pembangunan dalam bidang infrastruktur dan ekonomi serta sumber daya manusia dan bantuan pendidikan, yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan. Persentase peningkatan tiap tahun naik turun, hal ini menandakan bahwa kualitas output kegiatan pada tahun 2010 hingga 2016 belum terlaksana dengan maksimal.

#### **4.3.2 Keserasian Belanja**

##### **4.3.2.1 Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja**

Rasio Belanja per Fungsi Pemerintah Kota Samarinda, untuk menilai Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan ketentuan Undang – undang Dasar yang mengamanatkan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, serta kecukupan porsi anggaran lainnya. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 porsi untuk sektor pendidikan telah memenuhi anggaran sebesar 20% dari total APBD. Serta kecukupan untuk porsi sektor lainnya.

##### **4.3.2.2 Belanja Operasi**

Belanja Operasi mengalami peningkatan dari 71,27% di Tahun 2010 menjadi 80,87% di Tahun 2011 sehingga mengalami peningkatan rasio sebesar 9,6%, artinya porsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi pada Tahun 2011 lebih besar dibanding porsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi Tahun 2010. Ditahun 2012 menurun menjadi 64,64% dan

kembali menurun 55,37% di tahun 2013, dan sedikit meningkat menjadi 58,68% Tahun 2014 kemudian meningkat 62,59% di Tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 70,11% di Tahun 2016. Dan rata – rata persentase rasio keserasian pada belanja operasi sebesar 66,22% yang dikatakan cukup serasi. Belanja Operasi Pemerintah Kota Samarinda belum di katakan serasi karena hasil perhitungan di bawah 60 – 80%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan pemerintah Kota Samarinda maka akan meningkatnya total belanja operasi.

#### **4.3.2.2 Belanja Modal**

Belanja Modal Pemerintah Kota Samarinda belum dikatakan serasi karena hasil perhitungan berada di bawah 60 – 80%. Belanja Operasi Tahun 2010 sebesar 28,67% dan menurun Tahun 2011 sebesar 19,05%, kemudian meningkat Tahun 2012 sebesar 35,30%, kembali meningkat Tahun 2013 sebesar 44,62%, menurun Tahun 2014 sebesar 41,31%, dan kembali menurun Tahun 2015 sebesar 37,35% dan kembali menurun Tahun 2016 sebesar 29,84%. Rata – rata persentase rasio keserasian pada belanja modal sebesar 33,73% yang dikatakan kurang serasi. Dalam total belanjanya lebih besar dialokasikan untuk belanja yang terkait program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Secara umum proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah antara 19% – 45%. Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2010 – 2016 yang memiliki rata – rata belanja modal sebesar 33,73%.

Hal ini menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda masih diprioritaskan untuk belanja operasi sehingga belanja modal relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata rasio operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata – rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya belanja pegawai untuk belanja gaji, tunjangan PNS Daerah, Tambahan penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS dan uang Lembur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda lebih pada pengeluaran – pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas.

#### **4.3.2.3 Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung pada Pemerintah Kota Samarinda dihitung dengan menggunakan rasio belanja langsung dan tak langsung, menunjukkan bahwa belanja langsung pada tahun 2010 sampai tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan belanja tak langsung. Persentase total belanja langsung yang digunakan tahun 2010 sebesar 59,49% dan belanja tak langsung sebesar 40,51%. Belanja langsung yang digunakan tahun 2011 sebesar 54,09% dan belanja tak langsung sebesar 45,91%. Kemudian belanja langsung yang digunakan tahun 2012 sebesar 60,06% dan belanja tak langsung sebesar 39,94%. Belanja langsung yang digunakan tahun 2013 sebesar 65,79% dan belanja tak langsung sebesar 34,21%. Dan pada tahun 2014 Belanja langsung yang digunakan sebesar 64,53% dan belanja tak langsung sebesar 35,47%. Belanja langsung yang digunakan tahun 2015 sebesar 62,48% dan belanja tak langsung sebesar 37,52%. Belanja langsung yang digunakan tahun 2016 sebesar 63,87% dan belanja tak langsung sebesar 36,13%.

#### **4.3.4 Analisis Efisiensi Belanja**

Rasio efisiensi pada tahun Anggaran 2010 menunjukkan sebesar

70,43%, pada tahun Anggaran 2011 meningkat menjadi 79,51% dan pada tahun Anggaran 2012 menurun menjadi 74,90% sedangkan Pada tahun Anggaran 2013 kembali menurun menjadi 74,70%. Dan kemudian pada tahun Anggaran 2014 meningkat menjadi 82,29% dan pada tahun Anggaran 2015 kembali menurun menjadi 79,67% dan pada tahun Anggaran 2016 kembali meningkat menjadi 88,84%.

Jika dibandingkan dengan Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2015 maka Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2016 mengalami peningkatan rasio sebesar 9,17% artinya pada tahun 2016 belanja Pemerintah Kota Samarinda relatif lebih efisien. Peningkatan Rasio Efisiensi Belanja ini disebabkan total realisasi Belanja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2015 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2016.

Pemerintah Kota Samarinda berada pada predikat kurang dari 100%. Maka dikatakan kategori efisien dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang dimiliki sehingga tercapai penghematan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, rata rata rasio efisiensi belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda sudah mampu meminimalkan penggunaan sumber daya (anggaran belanja daerah) yang ada tetapi belum maksimal dalam penggunaan sumber anggaran yang dimiliki.

#### **4.3.5 Rasio Belanja Terhadap PDRB**

Efektivitas Belanja Daerah terhadap PDRB Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2010 sebesar 203,616%. Pada tahun 2011 sebesar 282,192%. Pada tahun 2012 sebesar 205,633%. Pada tahun 2013 sebesar 156,205%. Pada tahun 2014 sebesar 150,777%. Pada tahun 2015 sebesar 156,867%. Dan pada tahun 2016 sebesar 224,134%. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB cenderung tidak stabil. Pada tahun 2010 turun dan meningkat pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 menurun hingga tahun 2015. Dan kembali naik pada tahun 2016.

Rata - rata rasio belanja daerah terhadap PDRB Pemerintah Kota Samarinda sebesar 197,061%. Hal ini dikatakan bahwa meningkat dan menurunnya PDRB tiap tahun berdampak pada pengeluaran belanja pemerinthan. Karena menurunnya PDRB maka pendapatan akan menurun dan alokasi untuk belanja daerah juga menurun.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis Varians Belanja Pemerintah Kota Samarinda dikatakan efisien dan efektif karena pada realisasi belanja tidak melebihi anggaran.
2. Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2010 sampai 2016 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan. Menunjukkan bahwa kinerja dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan tiap tahunnya.
3. Analisis Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2010 sampai 2016 dikatakan mampu melakukan penghematan anggaran belanja

dengan baik dan efisiensi kurang dari 100%, hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase mencapai 78,62% dengan kriteria serasi.

4. Analisis Keserasian Belanja Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut:
  - a. Rata – rata persentase keserasian rasio belanja per fungsi mencapai 100% dari total belanja, pengeluaran belanja per fungsi pada sektor terealisasi dengan baik.
  - b. Rata – rata persentase keserasian belanja operasi sebesar 66,22% dengan kriteria serasi.
  - c. Rata – rata persentase keserasian belanja modal sebesar 33,73% dengan kriteria kurang serasi. Penyerapan belanja modal dinilai kurang serasi karena proporsi belanja dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik tidak berjalan maksimal.
  - d. Belanja Langsung dan Tidak Langsung  
Dari analisis keserasian belanja langsung dan belanja tak langsung pada tahun 2010 sampai tahun 2016, diketahui proporsi belanja tak langsung lebih besar dari proporsi belanja langsung. Hal ini karena belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai sedangkan belanja langsung digunakan untuk belanja program – program Pemerintah Kota Samarinda.
5. Analisis Belanja Terhadap PDRB secara tidak langsung berpengaruh terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda. Karena semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi belanja daerah.

## 5.2 Saran

Adapun Saran yang dapat berikan kepada pihak instansi khususnya Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan rasio efisiensi belanjanya di masa yang akan datang dalam penggunaan anggaran belanja daerah yang dimiliki dan memaksimalkan penggunaan sumber anggaran yang dimiliki.
2. Memperhatikan pertumbuhan belanjanya dengan menyeimbangkan dengan laju pertumbuhan pendapatan agar meningkat dimasa yang akan datang.
3. Mengelola anggaran belanja operasi dan modal yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan adanya kinerja yang baik dalam mengelola anggaran maka akan terjadi produktifitas dan efisiensi belanja yang lebih baik.
4. Memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan dan seimbang belanja untuk pembangunan daerah antara belanja untuk pemerintahan (Belanja Tak Langsung) dan belanja untuk pembangunan (Belanja Langsung)
5. Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## Daftar Pustaka

Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*, Bapekki Depkeu.

- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Laksbang Press Indo. Yogyakarta
- Ariefiansyah, Ryan dan Miyosi Margi Utami. 2012. *Membuat Laporan Keuangan Gampang*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2010. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2011. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2012. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2016. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Dadang Suwanda dan Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dina, Aryanto. 2012. *Penganggaran Sektor Publik*, Modul. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta
- Halim, Abdul. 2007a. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, 2012b. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, 2010a. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam Pengambilan keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010b. *Manajemen Keuangan Daerah, Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset: Yogyakarta.
- Margono. 2010. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Modul Akuntansi Keuangan Daerah.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Cetakan Kedua*. Bandung:Refika Aditama
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual Edisi Pertama, cetakan kedua*. Alfabeta, Bandung.